

PENGANGGARAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL: STUDI SIRI' NA PESSE  
METODOLOGI PADA PROGRAM DESA MENGEPUK KOTA DI KABUPATEN LUWU  
TIMUR

*LOCAL WISDOM BASED ON BUDGETING: THE STUDY SIRI' NA PESSE  
METHODOLOG ON THE BUDGETING OF VILLAGES SURROUNDING CITIES IN  
KABUPATEN LUWU TIMUR*

**Andi Mattingaragau Tenrigau**  
**Herawati Dahlan**  
**Nur Aida**

Universitas Fajar  
Jl. Prof. Abdurrahman Basalah (ex. Racing Centre) No.101, Kota Makassar  
E-mail : andimattaringaragau@gmail.com

**Budiarti Putri Uleng**  
Universitas Andi Djemma  
Jl. Puang Haji Daud No. 4 Kota Palopo

Naskah diterima tanggal 24 November 2020. Naskah direvisi tanggal 29 Desember 2020. Naskah disetujui tanggal 30 Desember 2020

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penganggaran berbasis siri' na pesse pada program Desa Mengepung Kota di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini sifatnya kualitatif dengan pendekatan dan alat analisis adalah siri' na pesse metodologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran berbasis siri' na pesse pada Program Desa Mengepung Kota dibangun atas lima aspek. Pertama: toleransi kebatinan siri' na pesse. Motivasi dalam penyusunan anggaran didasarkan atas reaksi positif rasa pesse (empati) aktor/pemerintah atas keterbatasan infrastruktur yang dirasakan masyarakat desa; Kedua, nilai-nilai siri' na pesse. Dalam penyusunan anggaran dilandasi dengan nilai tongeng (kebenaran), lempu' (kejujuran), getteng (ketegasan), dan adele' (keadilan); Ketiga, kinerja anggaran. Anggaran yang disusun terdistribusi ke desa-desa guna membiayai pembangunan infrastruktur atau sarana publik yang urgen dibutuhkan masyarakat desa seperti: jalan, jembatan, drainase, irigasi, sarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas publik lainnya. Keempat, kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur telah dimanfaatkan masyarakat desa sehingga mereka merasa lebih sejahtera karena kebutuhan publiknya telah terpenuhi; Kelima, harkat dan martabat. Apresiasi yang diterima masyarakat desa lahir karena merasakan kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik. Masyarakat merasakan jika harkat martabatnya terlahir kembali dan siri'nya dapat ditegakkan.

Kata Kunci: Penganggaran, Siri' na Pesse ; Kinerja Anggaran; Kesejahteraan

**Abstract**

*The purpose of this research was to determine Siri' na Pesse based on the budgeting of Village Surrounding Cities in Kabupaten Luwu Timur. This research is qualitative by means of the siri' na pesse methodology. The results showed that siri' na pesse based on the budgeting in the Village Surrounding Cities Program was built on five aspects. First: spiritual tolerance siri' na pesse. Motivation in budgeting is based on the positive reaction of actors/government pesse (empathy) to the limited infrastructure felt by the village community; Second, the values of siri' na pesse. In budgeting, it is based on the values of tongeng (truth), lempu' (honesty), getteng (assertiveness), and adele' (justice); Third, budget performance. The budget prepared is distributed to the villages to finance the construction of infrastructure or public facilities that are urgently needed by the village community, such as roads, bridges, drainage, irrigation, health and education facilities, and other public facilities. Fourth, welfare. The village community has utilized infrastructure development so that they feel more prosperous because their public needs*

have been met; Fifth, dignity. The appreciation received by the village community was born because they felt prosperity and a better standard of living. The community feels that their dignity is reborn, and their siri' can be upheld.

**Keywords:** Budgeting, Siri' na Pesse; Performance Budgeting; Prosperity .

## PENDAHULUAN

Setiap tahun, pemerintah pusat, propinsi, maupun kota dan kabupaten di seluruh Indonesia melaksanakan proses penganggaran untuk menetapkan anggaran tahun berikutnya. Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan guna dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu problematika yang dihadapi pemerintah selama ini adalah ketersediaan anggaran yang terbatas sehingga berdampak terhadap minimnya realisasi anggaran. Dalam kurun waktu 2017-2019 total realisasi anggaran seluruh propinsi di Indonesia bergerak fluktuasi. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, maka serapan anggaran dalam kurun waktu tersebut secara berturut-turut meningkat masing-masing sebesar 16,26%, 6,32%, dan 17,22%.

| Uraian   | 2017        | 2018        | 2019        |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| Sulsel   | 8.892.159   | 9.322.153   | 9.899.896   |
| Kenaikan | 28,30%      | 4,84%       | 6,20%       |
| Propinsi | 307.039.173 | 326.429.294 | 382.625.303 |
| Kenaikan | 16,26%      | 6,32%       | 17,22%      |
| Uraian   | 2017        | 2018        | 2019        |
| Sulsel   | 8.892.159   | 9.322.153   | 9.899.896   |
| Kenaikan | 28,30%      | 4,84%       | 6,20%       |
| Propinsi | 307.039.173 | 326.429.294 | 382.625.303 |
| Kenaikan | 16,26%      | 6,32%       | 17,22%      |

Sumber: BPS 2016-2019

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pengeluaran 2017-2019 (Rp Juta)

Berbanding lurus dengan data tersebut, peningkatan realisasi serapan anggaran juga terjadi di Sulawesi Selatan. Hanya saja, tren peningkatan bergerak dalam kisaran yang sempit. Peningkatan serapan anggaran terbesar hanya terjadi pada 2017 sebesar 16,26% sedangkan 2018 dan 2019 meningkat tipis masing-masing sebesar 4,84% dan 6,20%.

Hal ini menunjukkan bahwa

persoalan dalam anggaran dalam membiayai berbagai program pembangunan masih merupakan dilema yang dialami dari tahun ke tahun. Sementara itu, berbagai problematika sosial pada tataran akar rumput, khususnya di pedesaan harus segera diselesaikan supaya ketimpangan tidak menganga lebar.

Tidak ubahnya dengan persoalan tersebut, di Kabupaten Luwu Timur juga mengalami hal yang sama. Anggaran juga merupakan persoalan yang dihadapi setiap tahunnya. Namun keterbatasan anggaran tidak membuat daerah yang baru mekar dari Luwu Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 lalu (BHO Sekda Luwu Timur, 2005) larut dalam suasana keterbatasan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur justru berkomitmen dalam mengatasi keteringgalan dari kabupaten lain di Sulawesi Selatan, khususnya keterbelakangan infrastruktur desa yang ada dalam wilayah administrasinya.

Masalah yang dialami desa di Luwu Timur cukup kompleks. Selain karena letaknya merupakan daerah yang paling ujung bagian Utara di Kabupaten Luwu (saat belum mekar) maupun di Propinsi Sulawesi Selatan membuat wilayah ini terasa luput dari perhatian sehingga frekuensi arus kunjungan terbilang minim. Dengan demikian hal ini berdampak pada arus kas masuk (*cash in flow*) sehingga pendapatan masyarakat tidak optimal dan pada akhirnya menciptakan kesenjangan sosial.

Masalah ini belum lagi diperhadapkan pada problematika keterbatasan minimnya infrastruktur di desa berupa jalan, jembatan, pengairan/irigasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, dan berbagai fasilitas umum lainnya.

Situasi ini telah menggugah rasa *siri'* na *pesse* Pemerintah Kabupaten Luwu

Timur sehingga meluncurkan program Desa Mengepung Kota (Tenrigau, 2017b). Rasa *pesse* (empati) merupakan perasaan toleransi kebatinan atau empati yang dirasakan pengambil kebijakan dalam melihat keterbelakangan yang dialami desa-desa di Luwu Timur. Di saat bersamaan, juga mendorong munculnya rasa *siri'* atau malu karena masalah yang dihadapi desa adalah juga bagian dari para pengambil kebijakan yang merupakan satu kesatuan dalam tubuh yang sama dalam entitas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Luwu Timur masih berpegang pada nilai-nilai *siri' na pesse* dalam menyikapi problematika yang sedang dihadapi desa-desa di wilayahnya.

Keberpihakan yang ditunjukkan pemerintah setempat menunjukkan bahwa nilai-nilai *siri' dan pesse* di kabupaten Luwu Timur masih dikedepankan terutama dalam menyelesaikan problematika pembangunan di desa. Penelitian yang dilakukan Tenrigau (2015) menunjukkan adanya model penganggaran *siri' na pesse* dalam mewujudkan aparat sipil negara yang berkualitas terutama dalam menyusun anggaran.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimanakah penganggaran berbasis *siri' na pesse* pada program Desa Mengepung Kota di Kabupaten Luwu Timur?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penganggaran berbasis *siri' na pesse* pada program Desa Mengepung Kota di Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu, manfaat dari penelitian ini

adalah eksistensi penganggaran berbasis *siri' na pesse* dalam penyusunan program dalam setiap level di pemerintahan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Penganggaran**

Penganggaran merupakan bagian tidak terpisahkan di dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ia merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh program dan atau kegiatan untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Selain sebagai alat pengoordinasian kerja, anggaran juga berfungsi untuk memantapkan perencanaan terpadu, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan institusi/ lembaga, baik publik maupun swasta, dan bermanfaat bagi alat evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan itu sendiri. Munandar (2018) menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu. Penyusunan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga. Di dalamnya diatur tentang pokok-pokok penyusunan rencana kerja dan anggaran, proses penyusunan rencana kerja dan anggaran. Dalam Pasal 1 ayat (7) PP tersebut dinyatakan bahwa penganggaran terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana kerja keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang

didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Dengan demikian diharapkan regulasi ini dapat menjamin efisiensi pelaksanaan program Desa Mengempuk Kota di Luwu Timur.

Di samping itu penganggaran pembangunan desa bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 11 dinyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada ayat 12 pasal tersebut dinyatakan pula bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya, anggaran Dana Desa sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa penganggaran baik oleh institusi daerah maupun desa memiliki mekanisme pengelolaan anggaran yang bertujuan menjamin pengalokasian dana program dan kegiatan secara tepat dan terukur.

Namun dalam implementasinya prinsip ini mesti didukung pula oleh suatu sistem nilai/norma (kearifan lokal) pemerintah/masyarakat setempat dalam mendukung sistem nilai legal formal tersebut di atas. Salah satunya adalah konsep *Siri'na Pesse*.

### **Konsep Siri' na Pesse**

Secara etimologi kata *siri' na pesse* terdiri dari dua kata, yaitu *siri'* dan *pesse*. *Siri'* dari Bahasa Bugis berarti malu. Namun dalam konteks tertentu, *siri'* dapat juga diartikan sebagai harga diri (Mattulada, 2005) atau pendorong pembangunan (Lopa, 2005). Dengan demikian secara terminologi *siri'* adalah upaya untuk mempertahankan harkat dan martabat baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat yang lebih luas.

Sementara *pesse* dalam bahasa Bugis (Luwu) adalah pedis. *Pesse* diartikan sebagai rasa empati (Andaya, 2004), suasana masyarakat dalam hati (Hamid, 2005), perasaan haru atau empati (Pelras, 2006), atau toleransi kebatinan (Tenrigau, 2017b). Dalam konteks penelitian ini, maka secara terminologi *pesse* merupakan perasaan empati atau toleransi kebatinan terhadap keterpurukan yang dialami masyarakat desa di Luwu Timur.

*Pesse na siri'* dalam konsep *sulapa' eppa'* (bangunan segi empat) terkonstruksi dalam empat nilai, yaitu *tongeng* (kebenaran), *lempu'* (kejujuran), *getteng* (ketegasan), dan *adele'* (keadilan).

Terminologi *siri' dan pesse* dapat digunakan dalam segala situasi tergantung dari konteks yang melatarbelakangi. Dalam penganggaran, istilah *siri' na pesse* relevan digunakan karena terkait dengan perilaku individu dalam menyusun anggaran atau penganggaran.

Dalam penyusunan anggaran, ada dua istilah sering digunakan yang sama namun berbeda dalam implementasinya, yaitu penganggaran dan anggaran. Kata anggaran merupakan suatu rencana yang diukur dalam satuan uang yang berisi perkiraan belanja dalam suatu periode tertentu dan sumber yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Sementara penganggaran adalah aktivitas yang terus-menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaannya (Arif dkk, 2009).

Jadi penganggaran dalam konteks pembangunan desa merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara bertahap untuk menghasilkan nilai anggaran yang digunakan dalam membiayai berbagai

kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Hasil akhir dari penggunaan anggaran ditentukan oleh implementasi nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri aktor dalam proses penganggaran.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan dan alat analisis *siri' na pesse metodologi*. Pendekatan *siri' na pesse metodologi* merupakan studi tentang ilmu atau metode atas kasus-kasus yang dihadapi masyarakat kelas sosial berkebutuhan dalam mengatasi problematika yang sedang dihadapi (Tenrigau, 2017b). Kelas sosial berkebutuhan merupakan masyarakat yang secara ekonomi mengalami keterbatasan, keterpurukan, dan atau posisi lemah karena sesuatu. Pendekatan ini memokuskan pada hal-hal yang berhubungan dengan rasa *siri'* dan *pesse*.

Teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan aktor para pihak penyusun anggaran, observasi lapang ke situs penelitian, dan kepustakaan (APBD, rencana pembangunan, literasi dan lainnya).

Dalam mengungkap jawaban atas permasalahan yang diajukan, maka *siri' na pesse metodologi* juga dapat digunakan sebagai alat analisis. Menurut Tenrigau (2020) bahwa tahapan analisis dalam mengungkap penganggaran berbasis *siri' na pesse* dibangun dari lima aspek: a) identifikasi suasana kebatinan rasa *pesse* dan *siri'* atas problematika yang dihadapi masyarakat, b) identifikasi nilai-nilai (*values*) dalam penganggaran, c) identifikasi realisasi anggaran, d) identifikasi kesejahteraan (manfaat) yang dirasakan masyarakat, dan e) identifikasi harkat dan martabat. Pendekatan-pendekatan tersebut merupakan penjabaran alternatif teknis dari teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014) dalam penelitian kualitatif, di mana analisis dilakukan melalui empat tahap, yakni: Reduksi Data; Penyajian Data; Penarikan Kesimpulan dan

Verifikasi Data. Pada Tahap reduksi data, beberapa langkah yang dilakukan seperti: meringkas data, pengkodean, membuat catatan baik catatan obyektif, reflektif maupun marginal (catatan pinggir), membuat memo, analisis antar lokasi dan menyusun ringkasan. Di dalam tahap penyajian data dilakukan beberapa langkah seperti: menjelaskan konteks dalam penelitian, melakukan ceklis matriks. Pada tahap penarikan kesimpulan, kesimpulan sering masih bersifat sementara hingga diperoleh bukti-bukti atau fakta-fakta kuat lain pada saat verifikasi data di lapangan. Begitu seterusnya hingga diperoleh kesimpulan yang mantap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali di Luwu Timur. Sejak mekar 2003 lalu, pada awal-awal terjadinya pemisahan wilayah dari Luwu Utara, pemandangan berbeda telah dirasakan Pemerintah Luwu Timur terutama minimnya ketersediaan infrastruktur di desa-desa.

Menyikapi hal tersebut, maka upaya pembangunan di desa-desa kemudian digalakkan Pemerintah Luwu Timur melalui program Desa Mengepung Kota (DMK) pada 2004. Pola kerja program ini adalah memokuskan pembangunan lebih awal di desa-desa kemudian menuju ke kota (dalam hal ini Malili sebagai ibu kota kabupaten). Tujuannya agar distribusi sumber daya dan hasil produksi barang dan jasa yang ada di desa-desa lebih cepat termobilisasi. Sementara itu, di sisi lain agar masyarakat desa memiliki kesempatan sama dalam menikmati hasil pembangunan sehingga tercipta keadilan kesejahteraan.

Sebagai daerah yang secara historis pernah menjadi *ware'* ibu kota kerajaan Luwu pada periode I La Galigo (Tenrigau, 2017b), maka eksistensi masyarakat Luwu Timur dalam interaksi sosial masih kental mengamalkan nilai-nilai *siri' na pesse* dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi standar nilai ini masih

Nampak dipraktekkan dalam proses penganggaran, termasuk pada program Desa Mengepung Kota.

Berdasarkan alat analisis, maka penganggaran *berbasis siri' na pesse* pada program Desa Mengepung Kota di Luwu Timur diuraikan dalam lima aspek.

**Pertama**, aspek toleransi kebatinan *siri' na pesse*. Penyusunan anggaran di Luwu Timur tidak terlepas dari respon kebatinan rasa *pesse* atau empati atas problematika yang dihadapi masyarakat desa. Pemandangan keterbatasan infrastruktur di desa-desa menjadi pemandangan umum di mana-mana. Fasilitas umum seperti sarana: jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, olahraga, irigasi/pengairan dan berbagai fasilitas publik lainnya dirasakan sangat terbatas dan belum dapat memenuhi ekspektasi kebutuhan masyarakat desa secara utuh.

Situasi semacam ini juga mendorong rasa *siri'* (malu) para aktor penyusun anggaran. Apa yang dirasakan masyarakat desa adalah juga merupakan bagian dari masalah mereka. Keterbatasan yang dirasakan masyarakat desa juga dirasakan unsur pimpinan dan aktor penyusun anggaran Pemerintah Luwu Timur.

Salah satu wujud toleransi kebatinan rasa *siri' dan pesse* adalah peluncuran program Desa Mengepung Kota yang dipandang memberikan manfaat kepada masyarakat desa.

**Kedua**, aspek nilai-nilai *siri' na pesse*. Penyusunan anggaran di Luwu Timur syarat dengan nilai-nilai *siri' na pesse* yaitu: *tongeng* (kebenaran), *lempu'* (kejujuran), *getteng* (ketegasan), dan *adele'* (keadilan).

Nilai *tongeng* (kebenaran) diwujudkan aktor penyusun anggaran berupa ketaatan dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku atau yang mengikat. Salah satu wujud implementasi nilai ini dalam penyusunan anggaran adalah kepatuhan aktor memedomani daftar harga barang dan jasa yang dikeluarkan pemerintah Luwu Timur (Dinas Koperindag) sebagai bahan acuan dalam menetapkan anggaran program.

*Kita mengasistensi (anggaran) berdasarkan aturan atau pedoman yang berlaku (wawancara pihak Bappeda Luwu Timur).*

Jadi jelas bahwa kebenaran itu terletak pada keberpihakan pada aturan. Jika aktor penyusun anggaran telah mengindahkan aturan yang mengikat, maka anggaran telah disusun berdasarkan nilai *tongeng* (kebenaran).

Nilai *lempu'* (kejujuran) diwujudkan dalam berupa aktualisasi anggaran hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Artinya, amanahkan dari Musrenbang selanjutnya dilaksanakan oleh aktor dalam penyusunan anggaran kemudian diaktualisasikan di lapangan dalam bentuk pembangunan infrastruktur di desa.



Gambar 2  
Implementasi program berupa pembangunan irigasi desa di Luwu Timur

Nilai *getteng* (ketegasan) diwujudkan dalam bennuk komitmen kuat dalam mewujudkan nilai *tongeng* (benar) dan *lempu'* (jujur) dalam menyusun dan menggunakan anggaran. Hal ini diungkapkan pihak Bappeda Luwu Timur dalam menyikapi standar Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD):

*Perwujudan visi misi bupati terpilih dibreak down pertahun dengan RKPD, disitulah kita harus tegas (getteng) (wawancara pihak Bappeda Luwu Timur)*

*Getteng* (ketegasan) dalam penyusunan anggaran diwujudkan dalam bentuk integritas teguh pada kebenaran dan kejujuran terutama dalam menyelaraskan visi dan misi bupati dengan anggaran yang tersedia.

Nilai *adele'* (keadilan) diwujudkan dalam bentuk distribusi anggaran secara proporsional ke desa-desa dan satuan

kerja perangkat daerah (SKPD).

*Proporsi anggaran merupakan money follow program dan money follow function. Jadi keadilan (adele') dalam penganggaran terletak dalam mengasistensi program dan anggaran SKPD yaitu mengakomodir program-program mereka. (wawancara pihak Bappeda Luwu Timur).*

Jadi keadilan dalam penyusunan program khususnya Desa Mengepung Kota didasarkan pada implementasi pengajuan usulan anggaran dari setiap SKPD (termasuk desa) secara proporsional.

**Ketiga**, aspek kinerja anggaran. Istilah kinerja mengarah pada capaian dalam menyusun anggaran berbasis publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

| Uraian        | 2006          | 2007          | 2008           | 2009           |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Jalan         | 59.303        | 49.966        | 94.048         | 206.327        |
| Jembatan      | -             | -             | -              | 18.404         |
| Irigasi       | 21.759        | 10.274        | 24,483         | -              |
| Drainase      | -             | 14.400        | 16,200         | 56.572         |
| <b>Jumlah</b> | <b>81.062</b> | <b>74.560</b> | <b>134.761</b> | <b>281.303</b> |

Sumber: APBD Luwu Timur 2006-2009 (diolah)

Tabel 2. Alokasi Anggaran Desa Mengepung Kota 2006-2009 (Rp Miliar)

Tabel 2 menunjukkan komitmen Pemerintah Luwu Timur dalam membangun desa-desa yang dirasakan tertinggal selama ini. Distribusi anggaran terutama difokuskan pada pengadaan sarana jalan, irigasi, drainase, pendidikan dan kesehatan. Sektor ini merupakan pilar dalam menopang pembangunan desa agar ekonomi dapat bertumbuh dan masyarakat desa sebagai subjek mobilisasi menjadi cerdas dan sehat.

**Keempat**, aspek kesejahteraan. Distribusi anggaran ke desa-desa dalam program Desa Mengepung Kota telah memberikan efek pertumbuhan ekonomi. Konsekuensi program berdampak terhadap terpenuhinya kebutuhan publik berupa jalan, jembatan, irigasi, drainase, pendidikan, kesehatan dan berbagai fasilitas lainnya.

Selain menikmati fasilitas publik, pendapatan masyarakat juga meningkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Luwu Timur telah merasakan tingkat kesejahteraan yang

lebih baik dibandingkan sebelum program Desa Mengepung Kota dilaksanakan.

**Kelima**, aspek harkat dan martabat. Setelah masyarakat merasa sejahtera kini mereka merasakan harkat dan martabatnya terangkat atau *dipakatu* (terlahir) kembali. Dengan kata lain bahwa *siri'* nya atau harkat dan martabatnya telah ditempatkan pada posisi yang selayaknya dimiliki oleh setiap insan yang terlahir sebagai ciptaan sempurna.

*Mengapa mereka (orang-orang) mengakui, karena kita dipercaya. Kepercayaan kita berikan dari sudut pandang anggaran, yaitu jika kita mampu. Dengan adanya anggaran berbasis siri' na pesse atau kearifan lokal, nah inilah hasilnya, mendapatkan pengakuan baik secara institusional maupun secara publik. Pengakuan masyarakat itu merupakan harkat dan martabat. Bukti lain kita mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari pemerintah dan beberapa penghargaan lainnya. (unsur pejabat Luwu Timur).*

Berdasarkan kelima aspek tersebut menunjukkan bahwa penganggaran berbasis *siri' na pesse* pada program Desa Mengepung Kota diawali dari keprihatinan terhadap keterbatasan yang dialami masyarakat di desa. Melalui sentuhan program Desa Mengepung Kota, pada akhirnya masyarakat telah merasakan kesejahteraan dan harkat martabatnya telah diangkat (terlahir kembali).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa penganggaran berbasis *siri' na pesse* pada program Desa Mengepung Kota di Luwu Timur tersusun dari lima aspek. Pertama, toleransi kebatinan *siri' na pesse*. Ketimpangan pembangunan di desa-desa membuat masyarakat terpuruk sehingga menggugah empati pemerintah meluncurkan program Desa Mengepung Kota. Kedua, penganggaran berbasis nilai. Nilai yang dikedepankan dalam menyusun anggaran program adalah *tongeng* (kebenaran), *lemphu'* (kejujuran), *getteng* (ketegasan), dan *adele'* (keadilan). Ketiga, kinerja anggaran. Kinerja diwujudkan dalam bentuk distribusi anggaran pada jalan,

jembatan, drainase, irigasi, pendidikan, dan kesehatan. Keempat, kesejahteraan. Masyarakat memberikan pengakuan jika mereka merasa sejahtera setelah program Desa Mengepung Kota diluncurkan sehingga kebutuhan publik mereka terpenuhi. Kelima, harkat dan martabat. Masyarakat merasa harkat dan martabatnya terangkat karena mereka telah merasakan manfaat ketersediaan infrastruktur sehingga taraf hidup mereka juga meningkat. Dalam situasi ini, mereka mendapatkan apresiasi positif dan merasa dihargai atau *siri*'nya terlahir kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, L. Y. 2004. *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*. Makassar: Innawa.
- Arif, Bahtiar, Muchlis, dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. *Statistik Keuangan Propinsi 2016-2019*. Jakarta: BPS RI/BPS-Statistics Indonesia.
- Bagian Humas dan Organisasi. 2005. Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2004. Malili: BHO Sekda Luwu Timur.
- Hamid, A. (2005). *Kepercayaan dan Upacara dari Budaya Bugis Kuno*, dalam Nurhayati Rahman, Anil Hukma, dan Idwar Anwar (ed) *Laga Ligo: Menelusuri Jejak Warisan Dunia*. Makassar, Pusat Studi Lagaligo Divisi Ilmu Sosial dan Humaniora Pusat Kegiatan Penelitian Unhas.
- Lopa, B. (2005). *Siri Dalam Masyarakat Mandar. Dalam Siri' dan Pesse: Harga Diri Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja*. Cetakan kedua. Makassar, Pustaka Refleksi.
- Mattulada. (1995). *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang. Hasanuddin University Press.
- Miles dan Huberman. (2014). *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Munandar.M.(2018) *Budgeting; Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi Ke-2. BPF
- Tenrigau, A.M. (2015). *Model Penganggaran Berbasis Spiritual Siri' na Pesse Dalam Upaya Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik PKP2A LAN Makassar, 11(1), 25-32.
- Tenrigau, A. M. (2017b). *Menemukanali Konsep Penganggaran Siri' na Pesse: Studi Kasus Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Luwu Timur* (Disertasi). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Dahlan, Herawati, Tenrigau,A.M. 2020. *Model Governansi Manajemen Penanganan Korban Banjir: Studi Siri' na Pesse Metodologi* di Kabupaten Luwu Utara. Jurnal JEMMA, 3(2), 181-193.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.